

INDEKS INOVASI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA

I Nyoman Sutama¹, Nining Sudiyarti^{2*}, Diah Fidayanti³
¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: niningsudiyarti04@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 17 Mei 2022

Revised: 20 Juni 2022

Published: 30 Juni 2022

Keywords

Financial Management;
Innovation Index;
Dinas Kesehatan.

Abstrak

The purpose of this study was to know the financial management innovation index at the Public Health Office (Dinas Kesehatan) of Sumbawa District. The type of this study was descriptive study. The data used in this study was primary data. The technique used to collect data was through questionnaire. The populations in this study were all employees at the Public Health Office (Dinas Kesehatan) of Sumbawa District. The technique of determining the sample was using the Slovin formula, therefore the number of samples in this study was 55 samples. The data analysis technique used was standard equation for calculating the innovation index. Based on the results of the data analysis, the value of each dimension were as follow: The dimension of novelty with innovation score was of 7.74, the dimension of productive with value was of 7.76, the dimension of impact with value was of 7.52 and dimension sustainable with value was of 7.55. Then from the results of all the dimension concluded that financial management innovation index at the Public Health Office (Dinas Kesehatan) of Sumbawa District was 76.3 or 76.30% with the "Innovative" category.

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan inovasi disektor publik merupakan hal yang mendesak karena berbagai dinamika permasalahan publik yang muncul dan menuntut penyelesaian yang cepat. Muluk (2008) menjelaskan bahwa desentralisasi di era reformasi telah mendorong semakin kuatnya otonomi daerah sehingga keanekaragaman dalam pelayanan publik dan pembangunan menjadi suatu keniscayaan. Dorongan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang efektif dan ancaman penghapusan daerah otonom yang gagal dalam menjamin kesejahteraan rakyat telah menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup organisasi publik. Selain itu, desentralisasi pada saat yang sama telah mendorong adanya kompetisi antar daerah otonom guna menarik investasi dan mengembangkan daya tarik ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa iklim kompetisi mulai menggeliat di sektor publik. Iklim kompetisi itu mulai terlihat dengan adanya inovasi sektor publik.

Menurut Marsono, *et al.*, (2017), inovasi adalah proses atau hasil pengembangan, pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaharui produk (barang dan jasa), proses atau sistem yang baru, yang memberikan nilai tambah. Osborne dan Brown (2005) memunculkan konsep inovasi pada pelayanan publik yang menyatakan bahwa "*Innovation is the introduction of new elements into a public service – in the form of new knowledge, a new organization, and/or new management or processual skill. It represents discontinuity with the past*". Esensinya adalah bahwa inovasi itu sebagai upaya memperkenalkan berbagai elemen kedalam penyelenggaraan pelayanan publik. Wujudnya dapat berupa pengetahuan baru, organisasi baru, dan corak manajemen dan atau proses kemampuan kerja baru yang sama sekali berbeda dengan cara-cara di masa lampau. Artinya inovasi tentu harus meninggalkan tipe dan prosedur kerja lama menuju pola baru yang lebih presisi dan akseleratif dalam penyelenggaraan pelayanan.

Dasar hukum pelaksanaan inovasi pada sektor birokrasi adalah Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Bentuk inovasi daerah berdasarkan peraturan tersebut, yaitu berupa inovasi tata kelola pemerintah daerah dan inovasi pelayanan publik. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Sedangkan inovasi pelayanan publik, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

Inovasi birokrasi (daerah) dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi tata kelola dan pelayanan birokrasi dilakukan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inovasi sektor publik dihajatkan untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan agar mampu bersaing dengan pihak swasta, dalam menyediakan pelayanan yang prima dan utama bagi masyarakat, dengan mengkolaborasikan inovasi berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yang selama ini dinilai masih kurang maksimal.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menerapkan system inovasi dalam pengelolaan organisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu OPD yang telah melaksanakan inovasi. Salah satu bentuk inovasi daerah yang telah dilakukan adalah inovasi dalam bidang pengelolaan keuangan. Untuk membuat sistem pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, Dinas terkait melakukan suatu inovasi pengelolaan keuangan, yaitu *cash management system* (CMS). CMS adalah layanan pengelolaan keuangan, dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangan melalui fasilitas online (non tunai) secara *realtime*.

Sebelum Dinas Kesehatan menggunakan aplikasi CMS, Dinas Kesehatan menggunakan metode konvensional dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dengan metode konvensional memiliki beberapa kekurangan, yaitu laporan keuangan yang tidak akurat, transparansi keuangan yang rendah, dan transaksi konvensional (tunai) meningkatkan peluang kehilangan uang. Melalui inovasi CMS, para pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa merasa sangat terbantu, khususnya pegawai yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran. Pembayaran melalui CMS memudahkan bendahara membuat laporan keuangan secara tepat dan akurat. Kemudian transaksi kepada pihak ketiga bisa dilakukan selama 24 jam tanpa harus melakukan proses pengambilan uang dan membawa uang kemana-mana dengan resiko kehilangan yang besar.

Pemilihan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa sebagai lokasi penelitian terkait indeks inovasi pengelolaan keuangan dilandasi beberapa alasan, diantaranya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu OPD yang memiliki peran vital dalam memastikan terdistribusinya pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana inovasi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang inovasi pengelolaan keuangan, diantaranya Pamungkas, *et al.* (2020) yang melakukan penelitian untuk mengetahui berapa indeks inovasi sistem pengelolaan keuangan pada badan pengelolaan keuangan

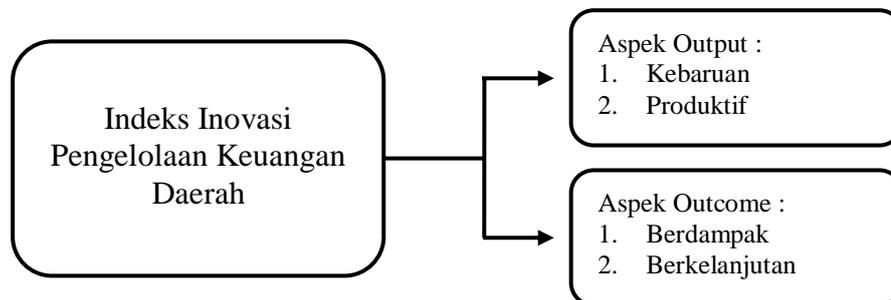
dan aset daerah kabupaten Sumbawa. Pengukuran indeks inovasi menggunakan empat indikator, yaitu kebaruan, produktif, berdampak dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks inovasi pengelolaan keuangan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Sumbawa adalah sebesar 83,07%.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berpedoman pada penelitian sebelumnya yang memiliki wilayah pengkajian pada persoalan yang sama tang inovasi pengelolaan keuangan, sehingga penulis berharap keberadaan penelitian ini dapat menjadi suatu rujukan ilmiah dalam melihat persoalan inovasi pengelolaan keuangan pada OPD di Kabupaten Sumbawa, khususnya pada Dinas Kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sejauh mana penerapan CMS pada Dinas Kesehatan, dan sebagai rujukan untuk lebih mengoptimalkan penerapan CMS.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan mengenai obyek penelitian secara lengkap, agar jelas keadaan atau kondisi obyek tersebut. Menurut Arikunto (2013), penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti ini menggambarkan tentang inovasi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Adapun kerangka dan alur penelitian ini disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Desain Penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau *scoring* (Sugiyono, 2017). Data kuantitatif dalam penelitian adalah jawaban responden yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer. Menurut Arikunto (2013), data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh responden. Adapun responden pada penelitian ini adalah pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2017) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa yang berjumlah 124 pegawai.

Sampel

Menurut Sugiyono (2017), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan kelonggaran ketidaktelitian 10%, sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = besaran sampel

N = besaran populasi

e = error atau kesalahan pengambilan sampel (10%)

Maka perhitungannya sebagai berikut:

$$n = \frac{124}{1 + 124(0,1)^2}$$

$$n = 55,35$$

$$= 55 \text{ (dibulatkan).}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 55 orang pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Menurut Sugiyono (2017), kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Melalui kuesioner, peneliti ingin mengetahui persepsi pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa tentang dimensi inovasi (kebaruan, produktif, berdampak, dan berkelanjutan) yang diterapkan dalam hal pengelolaan keuangan.

Pengukuran indeks persepsi inovasi ini dilakukan dengan menggunakan *skala likert* 1-10 dengan tujuan agar responden memiliki keleluasaan dalam mempersepsikan kualitas dan manfaat inovasi (Pamungkas, *et al.* 2020).

Tabel 1. Skala Likert

Pilihan Jawaban	Keterangan	Skor
1	Excellent Inovation	91,01 – 100,00
2	Sangat Inovatif	82,01 – 91,00
3	Inovatif	73,01 – 82,00
4	Cukup Inovatif	64,01 – 73,00
5	Biasa	55,01 – 64,00
6	Kurang Inovatif	46,01 – 55,00
7	Tidak Inovatif	37,01 – 46,00
8	Sangat Tidak Inovatif	28,01 – 37,00
9	Inovasi Buruk	19,01 – 28,00
10	Inovasi Sangat Buruk	10,00 – 19,00

Sumber: Pamungkas, *et al.* (2020).

Teknik Analisis Data

Perhitungan nilai indeks inovasi keuangan sesuai dengan konstruksi instrumen sebagaimana tersebut di atas, maka disusun formula atau rumus perhitungan sebagai berikut.

$$i = \frac{(50\% (S_{X1}) + 50\%(S_{X2})) \times 100}{10}$$

atau

$$i = 10 \left(\frac{1}{2} S_{X1} + \frac{1}{2} S_{X2} \right)$$

Dimana:

- I = Nilai indeks inovasi keuangan
- Sx1 = Nilai aspek output
- Sx2 = Nilai aspek outcome

Adapun perhitungan masing-masing dimensi adalah sebagai berikut :

1. Aspek Output

Terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi kebaruan dan dimensi produktif, sehingga rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$S_{X1} = \frac{(60 (S_{X1.1}) + 40(S_{X1.2}))}{100}$$

Dimana:

- Sx1 = Nilai aspek output
- Sx1.2 = Dimensi produktif

Setiap dimensi memiliki indikator tersendiri, sehingga perhitungan tiap dimensi adalah sebagai berikut :

$$S_{X1.n} = \frac{Sind_1 + \dots + Sind_y}{y}$$

Dimana:

- Sx1.n = Nilai tiap indikator pada aspek output
- Sindy = indikator
- y = jumlah indikator.

2. Aspek Outcome

Terdiri dari dua dimensi yaitu berdampak dan dimensi berkelanjutan, sehingga rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$S_{X2} = \frac{(50 (S_{X2.1}) + 50(S_{X2.2}))}{100}$$

Dimana:

- Sx2.1 = Dimensi berdampak
- Sx2.2 = Dimensi berkelanjutan

Setiap dimensi memiliki indikator tersendiri, sehingga perhitungan tiap dimensi sebagai berikut :

$$S_{X2.n} = \frac{Sind_1 + \dots + Sind_y}{y}$$

Dimana:

- $S_{x2.n}$ = Nilai tiap indikator pada aspek outcome
 S_{indy} = indikator
 y = jumlah indikator

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Hasil Penelitian

1. Aspek Output

a. Dimensi Kebaruan

$$S_{x1.n} = \frac{S_{ind_1} + \dots + S_{ind_y}}{y}$$

$$S_{x1.1} = \frac{S_{x1.1a} + S_{x1.1b} + S_{x1.1c} + S_{x1.1d} + S_{x1.1e}}{y}$$

Keterangan:

- $S_{x1.1}$ = Dimensi Kebaruan
 y = Jumlah Indikator
 $S_{x1.1a}$ = indikator pertama dimensi kebaruan
 $S_{x1.1b}$ = indikator kedua dimensi kebaruan
 $S_{x1.1c}$ = indikator ketiga dimensi kebaruan
 $S_{x1.1d}$ = indikator keempat dimensi kebaruan
 $S_{x1.1e}$ = indikator kelima dimensi kebaruan.

Berikut disajikan perhitungannya.

$$S_{x1.1} = \frac{S_{x1.1a} + S_{x1.1b} + S_{x1.1c} + S_{x1.1d} + S_{x1.1e}}{y}$$

$$S_{x1.1} = \frac{7,7 + 7,8 + 7,7 + 7,7 + 7,8}{5}$$

$$S_{x1.1} = \frac{38,7}{5}$$

$$S_{x1.1} = 7,74$$

Berdasarkan hasil perhitungan inovasi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, diperoleh nilai dimensi kebaruan adalah sebesar 7,74.

b. Dimensi Produktif

$$S_{x1.n} = \frac{S_{ind_1} + \dots + S_{ind_y}}{y}$$

$$S_{x1.2} = \frac{S_{x1.2a} + S_{x1.2b} + S_{x1.2c} + S_{x1.2d} + S_{x1.2e}}{y}$$

Keterangan:

- $S_{x1.2}$ = Dimensi Produktif
 Y = Jumlah Indikator
 $S_{x1.2a}$ = indikator pertama dimensi produktif
 $S_{x1.2b}$ = indikator kedua dimensi produktif
 $S_{x1.2c}$ = indikator ketiga dimensi produktif
 $S_{x1.2d}$ = indikator keempat dimensi produktif
 $S_{x1.2e}$ = indikator kelima dimensi produktif.

Berikut disajikan perhitungannya.

$$S_{x1.2} = \frac{S_{x1.2a} + S_{x1.2b} + S_{x1.2c} + S_{x1.2d} + S_{x1.2e}}{y}$$

$$S_{x1.2} = \frac{7,8 + 7,8 + 7,7 + 7,7 + 7,8}{5}$$

$$S_{x1.2} = \frac{38,8}{5}$$

$$S_{x1.2} = 7,76$$

Berdasarkan hasil perhitungan inovasi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, diperoleh nilai dimensi produktif adalah sebesar 7,76.

Setelah didapatkan nilai dimensi kebaruan sebesar 7,74 dan nilai dimensi produktif sebesar 7,76. Selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap kedua nilai tersebut untuk mendapatka aspek output. Berikut penulis sajikan perhitungan aspek output berdasarkan rumus, sebagai berikut :

$$S_{x1} = \frac{(60 (S_{x1.1}) + 40(S_{x1.2}))}{100}$$

Keterangan:

- S_{x1} = Aspek Output
- $S_{x1.1}$ = Dimensi Kebaruan
- $S_{x1.2}$ = Dimensi Produktif

Berikut disajikan perhitungannya.

$$S_{x1} = \frac{60 (7,74) + 40 (7,76)}{100}$$

$$S_{x1} = \frac{464,4 + 310,4}{100}$$

$$S_{x1} = \frac{774,8}{100}$$

$$S_{x1} = 7,75$$

Berdasarkan hasil perhitungan inovasi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, meliputi dimensi kebaruan dan dimensi produktif, didapatkan nilai aspek output adalah sebesar 7,75.

2. Aspek Outcome

a. Dimensi Berdampak

$$S_{x2.n} = \frac{S_{ind_1} + \dots + S_{ind_y}}{y}$$

$$S_{x2.1} = \frac{S_{x2.1a} + S_{x2.1b} + S_{x2.1c} + S_{x2.1d}}{y}$$

Keterangan:

- $S_{x2.1}$ = Dimensi Berdampak
- Y = Jumlah Indikator
- $S_{x2.1a}$ = indikator pertama dimensi berdampak
- $S_{x2.1b}$ = indikator kedua dimensi berdampak
- $S_{x2.1c}$ = indikator ketiga dimensi berdampak
- $S_{x2.1d}$ = indikator keempat dimensi berdampak.

Berikut disajikan perhitungannya.

$$S_{x2.1} = \frac{S_{x2.1a} + S_{x2.1b} + S_{x2.1c} + S_{x2.1d}}{y}$$

$$S_{x2.1} = \frac{7,6 + 7,6 + 7,5 + 7,4}{4}$$

$$S_{x2.1} = \frac{30,1}{4}$$

$$S_{x2.1} = 7,52$$

Berdasarkan hasil perhitungan inovasi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, diperoleh nilai dimensi berdampak adalah sebesar 7,52.

b. Dimensi Berkelanjutan

$$S_{x2.n} = \frac{S_{ind_1} + \dots + S_{ind_y}}{y}$$

$$S_{x2.2} = \frac{S_{x2.2a} + S_{x2.2b} + S_{x2.2c} + S_{x2.2d}}{y}$$

Keterangan:

- $S_{x2.2}$ = Dimensi Berkelanjutan
- Y = Jumlah Indikator
- $S_{x2.2a}$ = indikator pertama dimensi berkelanjutan
- $S_{x2.2b}$ = indikator kedua dimensi berkelanjutan
- $S_{x2.2c}$ = indikator ketiga dimensi berkelanjutan
- $S_{x2.2d}$ = indikator keempat dimensi berkelanjutan.

Berikut disajikan perhitungannya.

$$S_{x2.2} = \frac{7,5 + 7,6 + 7,6 + 7,5}{4}$$

$$S_{x2.2} = \frac{30,2}{4}$$

$$S_{x2.2} = 7,55$$

Berdasarkan hasil perhitungan inovasi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, diperoleh nilai dimensi berkelanjutan adalah sebesar 7,55.

Setelah didapatkan nilai dimensi berdampak sebesar 7,52 dan nilai dimensi berkelanjutan sebesar 7,55. Selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap kedua nilai tersebut untuk mendapatkan nilai aspek outcome. Berikut penulis sajikan perhitungan aspek outcome berdasarkan rumus, sebagai berikut:

$$S_{x2} = \frac{(50 (S_{x2.1}) + 50(S_{x2.2}))}{100}$$

Keterangan :

- S_{x2} = Aspek Outcome
- $S_{x2.1}$ = Dimensi Berdampak
- $S_{x2.2}$ = Dimensi Berkelanjutan

Berikut disajikan perhitungannya.

$$S_{x2} = \frac{50 (7,52) + 50 (7,55)}{100}$$

$$S_{x2} = \frac{376 + 377,5}{100}$$

$$S_{x2} = \frac{753,5}{100}$$

$$S_{x2} = 7,53$$

Setelah dilakukan proses pengolahan data dan didapatkan nilai aspek “Output” dan nilai aspek “Outcome”. Maka langkah selanjutnya, dilakukan perhitungan nilai indeks inovasi pengelolaan keuangan sesuai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dengan konstruksi instrumen sebagaimana tersebut di atas, maka disusun formula atau rumus perhitungan sebagai berikut.

$$i = \frac{(50\% (S_{x1}) + 50\%(S_{x2})) \times 100}{10}$$

atau

$$i = 10 \left(\frac{1}{2} S_{x1} + \frac{1}{2} S_{x2} \right)$$

Keterangan:

- i = Indeks Inovasi
- S_{x1} = Aspek Output
- S_{x2} = Aspek Outcome

Berikut disajikan perhitungannya.

$$i = 10 \left(\frac{1}{2} S_{x1} + \frac{1}{2} S_{x2} \right)$$

$$i = 10 \left(\frac{1}{2} 7,75 + \frac{1}{2} 7,53 \right)$$

$$i = 10 (3,87 + 3,76)$$

$$i = 10 (7,63)$$

$$i = 76,30$$

Berdasarkan hasil perhitungan nilai aspek output dan aspek outcome diatas, maka diperoleh hasil perhitungan indeks inovasi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa sebesar 76,30 atau 76,30%. Hasil tersebut kemudian akan disesuaikan dengan tabel skala indeks persepsi inovasi. Sehingga didapatkan skala indeks inovasi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa berada pada kategori “Inovatif” dengan rentang skor 73,01-82,00.

Pembahasan

Secara umum nilai aspek output sebesar 7,75, sedangkan nilai aspek outcome sebesar 7,53. Berdasarkan nilai tersebut, menunjukkan bahwa inovasi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa melalui penerapan CMS masuk dalam kategori inovatif. Jika dilihat secara keseluruhan (gabungan output dan outcome), indeks inovasi pada Dinas Kesehatan memperoleh skor 76,3 atau 76,30% dengan skala “Inovatif”. Meskipun secara umum diperoleh hasil inovasi dengan kategori yang inovatif, tetapi masih terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan inovasi.

Pada dimensi kebaruan dan dimensi produktif, secara umum memperoleh nilai sebesar 7,74 dan 7,76. Skor dari kedua dimensi ini menunjukkan skala inovasi pada kedua dimensi sudah “Inovatif”. Keinovatifan pada kedua dimensi ini dapat dilihat pada rekapitulasi jawaban responden yang terdapat pada lampiran II. Pada lampiran tersebut, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada indikator dari kedua dimensi tersebut menunjukkan total skor jawaban yang stabil. Keinovatifan pada kedua dimensi ini, dirasakan melalui pengelolaan keuangan yang tepat dan akurat, petugas yang mengelola keuangan bertindak profesional dan berkualitas, pengelolaan keuangan yang telah memenuhi standar, dan penerapan CMS yang telah mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Penerapan CMS telah mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan oleh bendahara, mengantisipasi mark up anggaran, dan aktivitas pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Kemudian pada dimensi berdampak dan dimensi berkelanjutan memperoleh nilai 7,52 dan 7,55. Nilai dari kedua dimensi pada aspek outcome ini lebih rendah dari nilai dari kedua dimensi pada aspek output. Hal ini disebabkan oleh rata-rata skor jawaban responden yang lebih rendah dan tidak stabil. Inovasi pada kedua dimensi ini dinilai inovatif pada indikator “dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, pemenuhan standar, konsistensi dan peningkatan atau perbaikan sistem”. Secara umum, penerapan CMS pada Dinas Kesehatan telah dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan dan telah mampu menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan seperti : pelaporan keuangan yang tidak akurat, mark up anggaran, kehilangan anggaran, SPJ fiktif, hilangnya bukti transaksi dan aktivitas transaksi barang/jasa yang lambat.

Kemudian dari sisi permasalahan, masih ditemukan masalah kurang inovatifnya pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan dari ketersediaan sarana dan prasarana, dan keterlibatan swasta dalam peningkatan kualitas inovasi. Belum optimalnya indikator-indikator ini disebabkan beberapa hal antara lain belum ada formulasi khusus tentang penerapan inovasi system pengelolaan keuangan, belum ada regulasi tingkat daerah yang mengatur tentang adanya pelibatan sektor swasta maupun masyarakat dalam system pengelolaan keuangan, dan keterbatasan anggaran dalam memenuhi sarana dan prasarana inovasi (Maggasingang dalam Pamungkas, *et al.* 2020).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyarankan pemerintah daerah bisa lebih kreatif dan inovasi dalam mengembangkan ekonomi daerah. Meskipun daerah memiliki masalah keterbatasan anggaran. Deputi Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto mencatat, ada tiga faktor yang dapat menghambat inovasi kebijakan dan kreativitas pejabat daerah. Hambatan tersebut antara lain regulasi, perencanaan dan kepemimpinan daerah, koordinasi antar pemangku kepentingan terkait, sampai dengan anggaran yang terbatas. Untuk mengembangkan inovasi dalam mendorong ekonomi daerah memerlukan sinkronisasi dan kebijakan lintas pemangku kepentingan yang hingga saat ini masih bersiat parsial. Dibutuhkan perintisan data inovasi daerah berbasis online yang bisa dipakai semua pihak sehingga sistem informasi di suatu daerah bisa diakses oleh semua daerah (Oke Finance, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, diperoleh nilai dari masing-masing dimensi. Dimensi kebaruan memperoleh nilai inovasi 7,74, dimensi produktif memperoleh nilai 7,76, dimensi berdampak memperoleh nilai 7,52 dan dimensi berkelanjutan memperoleh nilai 7,55. Kemudian dari hasil formulasi dari semua

dimensi tersebut, diperoleh nilai inovasi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa 76,3 atau 76,30% dengan kategori “Inovatif”.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kepada Pemerintah Daerah

Penulis berharap kepada pemerintah daerah sebagai pimpinan eksekutif tertinggi di daerah, untuk secara cepat memfasilitasi penerbitan aturan yang mengatur secara rinci dan baku mengenai inovasi pengelolaan daerah. Mulai dari sistem pengelolaan, standar sarana, standar kualitas pengelola hingga pada pelibatan pihak swasta, kerjasama dengan universitas dan ruang keterlibatan masyarakat secara luas.

2. Bagi Akademisi

Penulis berharap, dunia pendidikan di Kabupaten Sumbawa khususnya Universitas agar lebih pro aktif terlibat dalam peningkatan kualitas pengelolaan dana publik dan sumbangsih ide bagi peningkatan kualitas inovasi pengelolaan keuangan di daerah.

3. Bagi Pihak Swasta

Penulis berharap pihak swasta ikut terlibat dalam mendorong penerbitan regulasi dan penyediaan sarana pengelolaan keuangan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap, peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian yang penulis lakukan serta mengkaji inovasi pengelolaan keuangan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Marsono, Yohanitas, W.A., Suhartono, O., Kusuma, H.B., & Triksaningtiyas, G. (2017). *Pengukuran Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Pusat Inovasi Pelayanan Publik – LAN.
- Muluk, M.R.K. (2008). *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia.
- Oke Finance. (2017). Regulasi hingga Keterbatasan Anggaran Hambat Inovasi Pemda. Rabu 11 Januari 2017. <https://economy.okezone.com/read/2017/01/11/20/1588567/regulasi-hingga-keterbatasan-anggaran-hambat-inovasi-pemda>.
- Osborn, S.P. ,& Brown, K. (2005). *Managing Change and Innovation Public Service Organization*. New York: Routledge.
- Pamungkas, B.D, Karmeli, E., Kamaruddin, Asmini, & Ayati. (2020). Indeks Inovasi Sistem Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa. *Prosiding Seminar Nasional IPPeMas 2020*. Vol. 1, No. 1. Hal. 594-598.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.